

Peran Partai Politik dan Kalkulasi Elit Terhadap Karakteristik Koalisi (Studi Kasus : Pilkada Serentak di Kabupaten Karangasem dan Tabanan 2015)

Ni Wayan Indra Winasih, I Ketut Putra Erawan, Bandiyah
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Udayana
Email : eentherha_tom@gmail.com, ketuterawan@gmail.com,
dyah_3981@yahoo.com

ABSTRACT

Political party's actor and elite calculation are undivided element on politics process. Which is the political party as the main pillar in democratic system, and utilities of power and governs, also the elit position playing the good role and directing the legislation. Which is taken by this reseach named the role of political party and elite calculation toward coalition characteristic on study case of joint election at Bali 2015. People's unknowing about process of candidating and forming of coalition which having a privat tendency.

The metodh which used in the reseach is qualitative reseach with case comparative, with the case would been researching are election on Tabanan and Karangasem regency. As the foreword theories which use for the structure of reseach it using the coalition theory, elite theory, and rational choise theory and some reseach found which are the political intentions as the basic coalition forming in election. The candidate having a connection with using as the consideration of party's action in high level with dominant acts such big political party that given a relative freedom under their lower structure, however, the little party giving the more freedom for the local level in the districts.

Keyword : *Coalition, political party, local election, elite*

PENDAHULUAN

Koalisi sering disebut sebagai kolusi dan "kuali nasi", asumsi ini muncul berdasarkan pola-pola koalisi yang dibangun di tingkat pusat dan daerah tidak sesuai dengan teori dari pola koalisi pada umumnya. Koalisi yang terbangun cenderung pragmatis dan jauh dari unsur ideologi. Koalisi cenderung dibangun secara transaksional, hal ini dikuatkan dengan temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) tentang berbagai kasus *money*

politik yang menyangkut peran elit yang menimbulkan pertanyaan sejauh mana peran elit dalam Pilkada.

Pada Tahun 2015 Pilkada Serentak diselenggarakan di Indonesia dengan 265 daerah yang mengikuti Pilkada bupati, walikota, dan gubernur. Provinsi Bali menyelenggarakan Pilkada di 5(lima) kabupaten dan 1(satu) Kotamadya, diantara 5(lima) Kabupaten Karangasem dan Kabupaten Tabanan menjadi fokus penelitian dimana kedua kabupaten ini mempunyai perbedaan

yang mendasar salah satunya adalah secara politik kedua kabupaten dikuasai oleh partai yang berbeda baik di legislatif maupun eksekutif yaitu Kabupaten Karangasem dikuasai oleh partai Golkar sedangkan Kabupaten Tabanan dikuasai oleh Partai Indonesesia Perjuangan (PDIP), selain dari segi politik kultur, teritorial, tipe pemilih, keadaan wilayah di kedua daerah sangat berbeda.

Koalisi yang terbentuk di kedua kabupaten untuk mengusung kandidat terbentuk menjadi 5 koalisi, diantaranya 2 (dua) koalisi atau pasangan kandidat di Kabupaten Tabanan dan 3 (tiga) koalisi atau pasangan kandidat di kabupaten Tabanan, sebelum terbentuknya pasangan calon yang diusung oleh koalisi yang tetap perombakan kandidat marak terjadi di kedua daerah, dimana yang sebelumnya dipasangkan dibatalkan, bongkar pasang tidak hanya terjadi pada kandidat yang diusung namun juga pada koalisi yang terbentuk hal ini dikarenakan kegagalan komunikasi yang terjalin dimana terdapat kepentingan yang dipejuangkan, hal ini menunjukkan sisi pragmatis dalam Pilkada.

Secara garis besar karakteristik koalisi yang dibangun masih sulit disimpulkan, yaitu dengan bergabungnya koalisi baru, pertahanan koalisi lama atau *incumbent* dan

terbentuknya koalisi gabungan atau kombinasi. Formasi koalisi dibangun secara acak dengan bergabungnya partai nasionalis-sekuler dengan partai agamais, seperti bergaungnya Partai Gerindra dan PKS serta terbentuknya partai yang berseberang secara ideology yaitu Partai Golkar dan PDIP, menunjukkan unsur ideologi kepartaian dalam membentuk koalisi mulai terkesampingkan.

Pembentukan koalisi dan kandidat di daerah tidak terlepas oleh capur partai tingkat pusat, dimana solidaritas pada tingkat pusat digadagadag bertahan hingga di daerah, seperti halnya penguatan koalisi KMP (Koalisi Merah Putih) dan KIH (Koalisi Indonesia Hebat) pada Pilkada di daerah, hal tersebut menunjukkan kebebasan relatif yang diberikan kepada partai di daerah untuk memenentukan koalisi dan pengusung kandidat.

Pada hakikatnya penjarangan bakal calon dan koalisi partai politik dilaksanakan secara transparan dan demokratis, namun yang terjadi masyarakat di daerah pemilihan tidak mengetahui proses diusungnya calon kandidat dan pembentukan koalisi oleh partai politik dalam Pilkada, hak politik dalam masyarakat yang berpartisipasi cenderung terabaikan karena segenap proses penggabungan partai dan pencalonan berlangsung tertutup dan elit, sehingga tidak terbuka akses bagi

publik untuk mengetahui proses bagaimana seorang calon terpilih dan koalisi terbentuk sebelum berpartisipasi langsung dalam pemilu.

Pembentukan koalisi yang tertutup dan cenderung elitis tersebut, menunjukkan peran elit dalam pecaturan politik menjadi sangat dominan dan merupakan elemen penting yang tidak dapat dipisahkan baik skala lokal maupun nasional. Posisi elit atau aktor di daerah dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, posisi elit sangat strategis dalam pengusungan kandidat maupun pembentukan koalisi, namun pertimbangan yang digunakan oleh elit dalam menentukan kebijakan yang diambil belum terlihat jelas. Adapun rumusn maslah yang dikaji dalam penelitian ini diantaranya :

1. Apa yang menjelaskan pertimbangan koalisi partai dalam Pilkada?
2. Bagaimana peran partai politik terhadap pembentukan koalisi dalam Pilkada?
3. Bagaimana kalkulasi elit daerah terhadap koalisi dalam Pilkada?

KAJIAN PUSTAKA

Tinjaun Pustaka

Kajian-kajian mengenai koalisi partai politik, elit dan peran partai politik melalui penelitian/bukusudah banyak

dilakukan. Penulis menyertakan beberapa penelitian ilmiah yang telah dilakukan sebelumnya khususnya yang berkaitan dengan koalisi partai politik, peran partai dan elit, sebagai bahan referensi dalam menyelesaikan penelitian, diantaranya koalisi partai politik dan pola pecalonan kandidat dalam Pilkada dikaji oleh Ferry Kurnia Rizkiansyah, peran elit partai dan pola koalisi dalam pemilukada pernah dikaji oleh Jumari, koalisi partai politik dalam Pilkada diteliti oleh Sri Budi Eko Wardani, Soliditas antara koalisi partai di pusat dan di daerah pernah diteliti dalam jurnal Galih Tri Margono.

Konsep

Pertimbangan Koalisi dalam Pilkada

- a. Koalisi Partai Politik merupakan penggabungan beberapa partai politik yang konsisten dengan karakteristik tertentu, bertujuan memenangkan kompetisi dengan membentuk suatu kesepakatan mengusung kandidat dalam Pilkada, namun konsolidasi dan musyawarah selalu terjadi dalam suatu koalisi.
- b. Pertimbangan Koalisi Pertimbangan didefinisikan sebagai proses pencapaian keputusan berdasarkan landasan tertentu.

Pertimbangan koalisi merupakan proses bagaimana sebuah koalisi dibentuk untuk tujuan kemenangan.

Peran Partai Politik

a. Rekrutmen politik

Partai politik merupakan pihak yang diberikan wewenang dalam dalam mencalonkan kandidat yang dianggapnya layak, partai memiliki peran sentral dalam mencalonkan kepala daerah dan wakil kepala daerah yang berkompetisi dalam Pilkada.

b. Legalitas merupakan salah satu peran partai politik dimana partai politik mempunyai hak atau kekuasaan untuk mengatur struktur partai dan organisasinya berdasarkan ketentuan yang ditetapkan, salah satunya merupakan rekomendasi.

Rekomendasi menjadi syarat mutlak berdasarkan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten untuk dapat mengusung calon melalui jalur partai Politik, pasangan calon yang bertarung dalam Pilkada wajib pada saat pendaftaran

wajib menyertakan surat rekomendasi yang di tandatangani oleh Dewan Pimpinan Pusat (DPP) partai politik bersangkutan. Selain rekomendasi, mengusulkan pemberhentian anggotanya pada DPR maupun DPRD, mengusulkan pergantain antar waktu (PAW), mengajukan calon, dan sebagainya.

Kalkulasi Elit

1. Kalkulasi elit dalam Pilkada terdiri dari beberapa pertimbangan yang digunakan yaitu, pertama *Cost-benefit* "karier" pertimbangan ini mengacu pada kelangsungan "karier" elit, kedua *Cost-benefit* sumber daya politik yaitu sumber daya politik diartikan sebagai semua jenis faktor *input* yang dimiliki, ketiga *Cost-benefit* ekonomi/finansial pertimbangan ini mengacu pada modal karena hampir setiap aspek politik memerlukan pendanaan, keempat Pengalaman bekerjasama Pengalaman bekerja samaterkait dengan kepercayaan (*trust*), dimana

pertimbangan kerjasama sebelumnya menjadi landasan dalam menentukan hubungan yang dibangun kemudian.

Kerangka Teori

Teori Elit digunakan dalam penelitian ini dimana teori elit dapat memberikan gambaran mengenai peran dan pengaruh elit di masyarakat khususnya dalam pilkada untuk menentukan elit yang memegang peranan dalam menentukan keputusan, konsep-konsep yang digunakan diantaranya konsep dari Vilfredo Pareto dan Gaetano Mosca, dimana Pareto dan Mosca menunjuk elit sebagai sebuah kelompok yang memerintah, menjalankan fungsi penting dan mewakili nilai-nilai sentral masyarakat. Di dalam kehidupan masyarakat mutlak diperlukan kelompok minoritas yang menguasai anggota masyarakat lainnya, yang terdiri dari kelompok yang menduduki jabatan-jabatan komando politik dan mampu memengaruhi keputusan-keputusan politik.

Teori Rasional Choise atau teori pilihan rasional

Teori pilihan rasional digunakan dalam mengkaji peran pertimbangan koalisi dan kalkulasi yang digunakan dalam Pilkada, teori ini menekankan bahwa tindakan individu berangkat dari kepentingan tertentu tidak semata-mata bertindak kolektif untuk

memperjuangkan kepentingan bersama dan tindakan seseorang cenderung menjadikan kepentingan pribadi lebih elastis, teori ini adalah langkah pengambilan keputusan dimana pilihannya yang paling mendekati keuntungan, teori ini digunakan untuk menganalisa perilaku dan keputusan pemegang kebijakan.

Teori Koalisi

Teori Koalisi digunakan untuk menganalisa pertimbangan koalisi yang digunakan dalam Pilkada. William Riker menjelaskan tentang koalisi dengan teorinya *Minimal Winning Coalition* (MWC) yaitu diasumsikan dengan meraih kemenangan di parlemen dapat memaksimalkan kemenangan untuk meraih kekuasaan eksekutif, dengan memperoleh kemenangan minimal (50% +1) di parlemen. Sebagai kritik muncul menanggapi teori *Minimal Winning Coalition* (MWC), diantaranya bagaimana cara menentukan keanggotaan koalisi, loyalitas para anggota terhadap koalisi, anggota mengabaikan preferensi kebijakan partai koalisi, dan yang terakhir terdapat kemungkinan koalisi mayoritas terbukti kalah dalam kompetisi pemenangan atas koalisi minoritas dalam pemilihan umum, karena fenomena yang terjadi menunjukkan koalisi besar atau

mayoritas tidak menjamin kemenangan dalam pemilu. Berdasarkan kritik tersebut munculah teori *Minimum Connected Winning* (MCW) dari Robert Alexrod yang berasumsi bahwa terbentuknya koalisi berpijak pada kesamaan ideology, senada dengan teori yang dikemukakan Robert, Arend Lijphart juga mengemukakan 5 (lima) teori koalisinya yaitu Arend Lijphart mengemukakan beberapa teori koalisinya yaitu *Minimal Winning Coalition*, *Minimum Size Coalition*, *Bargaining Proposition* atau *Coalition with the Smallest Number of Party*, *Minimal Range Coalition*, *Minimal Connected Winning Coalition*.

METODELOGI PENELITIAN

Metodologi Penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian kualitatif dengan kasus komparatif atau perbandingan kasus dengan membandingkan kasus yang berbeda atau *different system design* yaitu Kabupaten Karangasem dan Kabupaten Tabanan, pengumpulan data dilakukan dengan *interview* atau wawancara secara langsung dengan pihak-pihak yang berpengaruh atas koalisi dan pembentukan kandidat.

HASIL PEMBAHASAN

Perbandingan peran partai politik di Kabupaten Karangasem dan Tabanan

a. Rekomendasi

Rekomendasi merupakan syarat utama sahnyanya partai politik dalam mengusung calon kandidat, baik kandidat yang diusung oleh partai koalisi maupun partai tunggal. Masing-masing partai politik harus mendapatkan legalitas yang menyatakan sahnyanya kandidat yang diusung. Rekomendasi merupakan syarat secara legalitas yang dikeluarkan oleh pimpinan partai politik di tingkat pusat yaitu Dewan Pimpinan Pusat (DPP) partai politik bersangkutan berdasarkan hasil penjangkaran kandidat yang berasal dari daerah.

Peran partai politik pusat sebagai struktur tertinggi yang berhak mengeluarkan rekomendasi sebagai syarat mutlak dalam mencalonkan kandidat dalam Pilkada. Rekomendasi yang dikeluarkan oleh partai politik seringkali menuai permasalahan, di kedua kabupaten rekomendasi menjadi rebutan para kader dimana kader yang tidak mendapatkan rekomendasi partai mencalonkan diri melalui partai lain dan keluar dari partai bersangkutan karena tidak dicalonkan.

1. Strategi Pemenangan

Secara umum strategi pemenangan dari pencalonan kandidat

berjalan atas kerjasama pusat daerah, namun strategi pemenangan tetap ditentukan oleh pusat, partai di daerah hanya mengikuti yang diarahkan oleh pengurus di tingkat pusat. Strategi pemenangan yang dimaksudkan dapat berupa arahan-arahan dalam rapat-rapat atau pertemuan dan strategi menempatkan orang-orang partai pusat di daerah.

2. Jaringan

Secara garis besar partai kecil maupun partai besar di daerah tetap dikendalikan oleh partai di tingkat pusat yang membedakan hanya legitimasi pusat atas daerah. Apabila terdapat konflik atau perbedaan pandangan dan kebijakan dalam menentukan arah koalisi dan pembentukan kandidasi seperti bongkar-pasang kandidat melalui musyawarah diselesaikan oleh pengurus daerah kewilayahan dan keputusan akhirnya di pusat, jadi semua struktur kepartaian baik pusat, wilayah, maupun daerah turut mengambil bagian dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya mengawal pencalonan di Pilkada, hal ini menyangkut peran partai politik dengan perannya sebagai lembaga kontrol dan sarana pengatur konflik dalam internal partai.

Kalkulasi elit yang digunakan dalam Pilkada KARangasem dan Tabanan

1. *Cost and benefit* sumber daya politik

Sumber daya politik diartikan sebagai semua jenis faktor *input* yang dimiliki, baik secara sadar atau tidak sadar oleh aktor-aktor sosial yang menjadikan mereka berkuasa dalam suatu tatanan sosial masyarakat. Pilkada di Kabupaten Karangasem pertimbangan sumber daya politik menjadi salah satu pertimbangan dalam menentukan calon yang diusung, hal tersebut dianggap sangat penting dalam menunjang keberhasilan dalam Pilkada, salah satu pasangan calon di Kabupaten Karangasem membiayai seluruh pendanaan yang dikeluarkan pada saat Pilkada yaitu dengan di usungnya I Gusti Ayu Mas Sumatri sebagai calon bupati yang sumber daya keuangan yang dimilikinya.

Di Kabupaten Tabanan terjadi hal yang serupa yaitu dengan diusungnya Ni Putu Eka Wiryastuti sebagai calon bupati dengan sumber daya yang dimilikinya yaitu Eka Wiryastuti merupakan putri dari I Nyoman Adi Wiryatama yang *power* atau kekuasaan yang menjadi modal dalam pencalonannya, hal tersebut tidak hanya terbukti dari terpilihnya Adi Wiryatama untuk kedua kalinya sebagai Bupati Tabanan sebelumnya, saat ini Adi Wiryatama terpilih sebagai anggota DPRD, dengan perolehan suara terbanyak dalam Pileg pada 2015, Ia menjabat sebagai Ketua DPRD Provinsi Bali, dengan kata lain kekuasaannya masih bertahan sampai saat ini.

2. *Cost and benefit* pengalaman bekerjasama

Mempertahankan *incumbent* (petahana) merupakan langkah yang ditempuh di Kedua Kabupaten dalam mengusung kandidat, yaitu dengan dikeluarkannya keputusan oleh PDIP untuk mempertahankan *incumbent* (petahana) di 5 (lima) daerah di Bali, salah satunya adalah mempertahankan *Incumbent* di Kabupaten Tabanan yaitu pasangan Ni Putu Eka Wiryastuti dan I Komang Gede Sanjaya. Di Kabupaten Karangasem, Wakil Bupati Karangasem sebelumnya I Made Sukarena dicalonkan oleh partai yang sama yaitu partai Golkar sebagai calon bupati yang didampingi oleh I Komang Kisid (adik I Wayan Geredeg) sebagai calon wakil bupati. Pasangan I Made Sukarena dan I Komang Kisid tidak secara langsung *incumbent* (petahana) seperti pasangan di Tabanan, namun secara visi dan misi pemerintahan yang ingin dibangun oleh pasangan ini tidak berbeda jauh dengan pemerintahan sebelumnya. Hal tersebut diperkuat dengan I Wayan Geredeg (kakak calon wakil bupati) saat ini menjadi ketua penasehat tim pemenang kandidat dan pasangan kandidat di usung oleh partai yang sama yaitu Golkar. Fenomena tersebut membutuhkan adanya pertimbangan anatara kerjasama sebelumnya dengan pengusungan kandidat. Pengalaman bekerjasama terkait dengan Kepercayaan (*trust*) yaitu dimana

pertimbangan bekerjasama sebelumnya menjadi landasan dalam membangun kerjasama berikutnya, dalam penelitian ini dimaksudkan dalam mengusung kandidat maupun berkoalisi.

3. *Cost and benefit* Jaringan

Jaringan (*connected*) merupakan hubungan yang tercipta berdasarkan kesamaan tertentu yang saling berhubungan antara satu dengan yang lain. Di Kabupaten Tabanan dan Karangasem Jaringan merupakan salah satu pertimbangan yang diambil dalam menentukan calon kandidat, Jaringan terdiri dari berbagai bentuk untuk menghubungkan antar organisasi, perorangan maupun masa. Salah satunya adalah organisasi masyarakat dan kekerabatan.

Aspek kekerabatan dapat dilihat di Kabupaten Tabanan mengusung calon *incumbent* Ni Putu Eka Wiryastuti sebagai anak dari mantan Bupati I Nyoman Adi Wiryatama yang telah menjabat 2 (dua) kali masa Jabatan yang tentunya dapat memanfaatkan jaringan yang dahulunya dibangun oleh ayahnya, selain jaringan sebagai mantan bupati, I Nyoman Adi Wiryatama juga dikenal memiliki kelompok preman yang kuat dimana organisasi ini siap terjun dan mengawal dalam menggerakkan masyarakat.

Hal serupa terjadi di Kabupaten Karangasem dalam mengusung I

Komang Kisid sebagai calon wakil bupati yang dicalonkan oleh Partai Golkar merupakan adik kandung dari mantan bupati I Wayan Geredeg yang sebelumnya menjabat selama 2 (dua) periode. Dipilih dan bertahan 2 (dua) periode untuk memimpin Karangsem tentunya dengan dukungan penuh dan partisipasi yang tinggi dari masyarakat, jaringan yang telah terbangun sebagai pondasi atau modal dalam Pilkada, selain dari pada hal tersebut I Komang Kisid berdasarkan kesatuan masyarakat Bali yang dikenal dengan istilah “dadia”, dalam hal ini ia selaku pengelingsir dari “Arya Kanuruhan” yang tentunya mempunyai kekuatan masa yang besar dan identitas tertentu untuk didukung oleh anggota-anggotanya. Koalisi yang mengusung kandidat tersebut dalam wawancara menyatakan memperoleh dukungan dari berbagai Organisasi Masyarakat (Ormas) yang turut menggerakkan masanya untuk mendukung pasangan calon.

Organisasi Masyarakat tidak hanya organisasi yang yang telah ada, namun terdapat organisasi yang telah didirikan oleh kandidat sebelum diusung dalam Pilkada. Di Kabupaten Tabanan calon wakil bupati *Incumbent* I Komang Gede Sanjaya sebelum dicalonkan pada 2010, I Komang Gede Sanjaya mempunyai organisasi dinamai “FORKOT” yang merupakan kepanjangan dari Forum Komunikasi Rakyat Tabanan. Kandidat calon Bupati

Karangsem yaitu I Gusti Ayu Mas Sumatri juga mempunyai organisasi yang la dirikan sebelum maju dalam pilkada yaitu Gerakan Masyarakat Terpadu (GMT), dimana organisasi ini dimotori oleh Gusti Made Tusan yaitu suami dari I Gusti Ayu Mas Sumatri. Organisasi ini bergerak di bidang sosial kemasyarakatan, berbagai aksi sosial, dan pelayanan terhadap masyarakat kurang mampu di Kabupaten Karangasem dilakukan. Selain pergerakan mesin partai oganisasi tersebut juga bergerak aktif dalam membentuk dan menjanging masa.

Analisa Teoritik Peran Partai Politik dan Kalkulasi Elit Terhadap Karakteristik Koalisi dalam Pilkada di Kedua Kabupaten

Kalkulasi elit dalam koalisi

Elit merupakan sekelompok kecil masyarakat yang mempunyai kedudukan dan pengaruh dalam masyarakat. Elit partai berpengaruh dalam pembentukan koalisi di kedua kabupaten, seperti yang diungkapakn oleh Vilredo Pareto yang mempercayai masyarakat diperintah oleh sekelompok kecilmasyarakat yang mempunyai kelebihan dan kualitas dalam bidang tertentu yang diperlukan dalam kekuatan sosial masyarakat itu sendiri.

Elit terdiri dari elit yang berkuasa dan tidak berkuasa, namun yang akan dianalisa dalam penelitian ini adalah elit

yang berkuasa (*governing elit*), karena ialah yang memiliki kekuasaan untuk menggabungkan kekuasaan dengan tujuan yang lebih penting, elit yang berkuasa dimaksudkan adalah struktur partai dan kader partai. Dalam Pilkada elit bertindak sebagai penentu keputusan dengan menggunakan kalkulasi tertentu. Pertimbangan yang digunakan elit antara lain :

- a. *Cost* (biaya) dan *benefit* (keuntungan) sumber daya politik

Teori rational choice juga dapat menjelaskan kalkulasi yang digunakan elit untuk mempertimbangkan kandidat yang diusung, hal tersebut terlihat dari pertimbangan untung rugi finansial untuk mengusung I Gusti Ayu Mas Sumatri dalam Pilkada, mengingat I Gusti Ayu Mas Sumatri merupakan Kader PDIP atau kader partai diluar Koalisi Karangasem Hebat yang merupakan salah satu tokoh yang sudah dikenal sebagai kader partai besar, pilihan tersebut diperkuat dengan sumber daya finansial yang dimiliki kandidat hingga seluruh pembiayaan yang dikeluarkan dalam pilkada dibiayai oleh kandidat. Pertimbangan yang sama terjadi di Kabupaten Tabanan diusungnya I Wayan Sarjana yang merupakan kader PDIP yang telah mempunyai massa dan diusungnya Ni Putu Eka Wiryastuti yang merupakan *incumbent*, dengan sumber daya politik yaitu kekuasaan atau power yang dimiliki ayahnya.

- b. *Cost* (biaya) dan *benefit* (keuntungan) Sumber Daya Jaringan

Robert Alexrod dalam teorinya yaitu *Minimal Connected Winning* (MCW) Coalition menyatakan berkoalisi berdasarkan kedekatan preferensi kebijakan teori ini juga dikemukakan oleh Arend Lijphart yaitu memanfaatkan jaringan sebagai penghubung untuk memaksimalkan dukungan dari para calon kandidat, kalkulasi elit yang digunakan dalam membangun koalisi mempertimbangkan jaringan yang dimiliki oleh kandidat yang diusung seperti I Komang Kisid calon Bupati memiliki jaringan sebelumnya, pertimbangan lainnya adalah ia merupakan "Penglingsir" Arya Kanuruhan (salah satu kesatuan golongan masyarakat Bali), I Wayan Geredeg juga diketahui sebagai Sesepuh PSAK-TAK (Paruman Semeton Arya Kanuruhan-Tangkas Kori Agung), yang pada saat pencalonannya didukung sepenuhnya oleh anggota-anggotanya. Kandidat lain yang telah memiliki jaringan sebelumnya adalah I Gusti Ayu Mas Sumatri dimana organisasi sosial yang dimilikinya yaitu GMT (Gerakan Masyarakat Terpadu) yang bergerak dibidang sosial kemasyarakatan.

Jaringan tidak hanya bermakna memaksimalkan kemenangan, membangun jaringan untuk melumpuhkan lawan juga merupakan

salah satu strategi dalam meraih kekuasaan hal tersebut seperti yang terjadi di Tabanan, dimana berdasarkan sumber yang ada kandidat I Wayan Sarjana disebut sebagai “Calon Boneka” dari I Nyoman Adi Wiryatama (ayah dari pesaing Sarjana), calon boneka yang dimaksudkan adalah calon yang mencalonkan diri hanya untuk melangsungkan proses pemilu yang mungkin dibatalkan apabila hanya ada calon tunggal. Hal tersebut diperkuat dengan pembatalan diusungnya kandidat Arya Budi Giri (ABG) sebagai calon bupati, dengan kalkulasi apabila Arya Budi Giri (ABG) dicalonkan maka kemungkinan perolehan suara adalah 50% bebanding 50%, karena popularitas Arya Budi Giri dinilai mampu menandingi Eka Wiryastuti.

Dipilihnya I Wayan Sarjana berdasarkan pertimbangan selain ia didukung oleh 2 (dua) partai sebelum didukung KRT yaitu Partai Nasdem dan Partai Hanura, hingga pada saat diusung ia disertai 2 (dua) partai tersebut. Berdasarkan kasus-kasus diatas membuktikan pertimbangan jaringan yang dikemukakan oleh teori Robert Alexrod dan Arend Lijphat sesuai dengan kasus yang terjadi, yaitu dengan memanfaatkan jaringan-jaringan yang ada untuk memperbesar kemenangan atau melumpuhkan lawan dan jaringan dibentuk untuk dapat membangun hubungan baru dengan kelompok tertentu dengan tujuan yang sama.

Peran partai politik terhadap koalisi

Berdasarkan hasil penelitian di kedua kabupaten menunjukkan peran partai politik yang besar dalam Pilkada, dimana partai politik merupakan organisasi yang paling siap melakukan langkah dan tindakan politik yang mampu mempengaruhi proses Pilkada, diantaranya legalitas yang dimiliki oleh partai merupakan kebijakan strategis partai politik dalam menentukan masa depan partainya yaitu rekomendasi, proses kandidasi dilakukan oleh partai politik dimana dalam menjaring dan menyaring kandidat dilakukan oleh partai politik. Penulis menganalisa peran partai dalam koalisi sebagai berikut :

a. Jaringan

Peran partai politik dalam pembentukan koalisi di kedua Kabupaten cenderung dibentuk berdasarkan jaringan kepartaian, hal tersebut dibuktikan dengan terbentuknya koalisi baru di Kabupaten Karangasem dengan sebutan Koalisi Karangasem Hebat (KIH), dimana koalisi tersebut merupakan terjemahan dari koalisi di tingkat pusat atau turunan dari Koalisi Indonesia Hebat (KIH), namun koalisi yang terbentuk di Karangasem beranggotakan 3 (tiga) partai yaitu Partai Nasdem, PKPI, dan Hanura. Ketiga partai ini tidak bergabung dengan PDIP layaknya pada tingkat pusat dikarenakan gagalnya

komunikasi antar elit. Tidak hanya pada peran partai ditingkat pusat, terjemahan koalisi kewilayahan juga menjadi pertimbangan koalisi yang dibentuk, yaitu pada Pilkada Karangasem dengan terbentuknya koalisi yang merupakan turunan dari Koalisi Bali Mandara (KBM), di kedua Kabupaten terdapat 2 (dua) bentuk koalisi yang sama yaitu Koalisi Bali Mandara (Partai Golkar, partai Gerindra, Partai Demokrat, dan PKS), namun Partai Demokrat di Karangasem menarik dukungan dari koalisi sama halnya yang terjadi pada Koalisi Rakyat Tabanan (KRT) dimana Partai Golkar memutuskan hal yang sama pada koalisi terjemahan dari Koalisi Bali Mandara (KBM) di Tabanan ini.

Peran partai politik yang dilakukan oleh partai politik dalam membentuk koalisi tidak terlepas dari pengaruh partai pada tingkat pusat maupun kewilayahan, *Teori Minimal Connected Winning Coalition* yang dikemukakan oleh salah satu teori koalisi dari Arend Lijphat dan Robert Alexrod, dimana berkoalisi berdasarkan kedekatan prefensi atau jaringan karena ketika jaringan partai pusat maupun lingkup kewilayahan diterjemahkan dalam skala di daerah dapat memudahkan proses negosiasi dan dan memungkinkan adanya keselarasan pembuatan kebijakan dalam pembentukan koalisi dan kandidasi antara pusat, kewilayahan, dan daerah

kerena karena telah tercipta kerjasama sebelumnya.

b. Pragmatisme atau kepentingan

Peran partai politik dalam pembentukan koalisi di kedua kabupaten cenderung pragmatis, hal tersebut dibuktikan dengan terjemahan koalisi kewilayahan di daerah yaitu Koalisi Bali Mandara (KBM) yang ditemahkan di kedua daerah, namun tercipta perpecahan seperti yang telah dibahas dalam peran partai sebelumnya, yaitu Partai Golkar di Tabanan dan Partai Demokrat di Karangasem mengundurkan diri dari koalisi berdasarkan arahan dari partai di tingkat pusat berdasarkan rekomendasi yang dikeluarkan. Penulis membaca kecenderungan lain terhadap kedua kasus tersebut dimana keluarnya kedua partai dari koalisi dikarenakan kekecewaan dari partai akibat kader yang dicalonkan tidak terpilih untuk diusung dalam koalisi yang pada akhirnya bergabung dengan partai berseberangan yaitu koalisi *incumbent* PDIP dan partai koalisi baru. Logika dasarnya, apabila calon kandidat tidak masuk, maka koalisi gagal terbentuk, pertimbangan selanjutnya dengan bergabung dengan koalisi yang mempunyai kemungkinan menang lebih tinggi. Hal tersebut menunjukkan bahwa seseorang cenderung melakukan tindakan yang mereka yakini tentunya

mempunyai kemungkinan terbesar berhasil ketika mereka dihadapkan pada suatu keharusan bertindak yang menjadikan kepentingan pribadi lebih elastis. Hal ini ditekankan oleh *Teori Rational Choise* karena keputusan yang diambil berangkat dari kepentingan tertentu, dimana dalam teori ini menekankan seseorang cenderung mengambil keputusan yang paling menguntungkan atau dengan resiko terkecil yang ditimbulkan.

Terdapat perbedaan perilaku partai dengan kekuatan besar dan partai dengan kekuatan kecil terlihat dalam kedua daerah, berdasarkan hasil penelitian memaparkan bahwa partai dengan kekuatan kecil di daerah diberikan kebebasan yang lebih besar dalam menentukan kebijakan dalam mengusung calon maupun membentuk koalisi yang didasarkan atas partai kecil dianggap lebih mengetahui situasi dan kondisi di daerah walaupun keputusan akhir tetap berada di tangan pusat, namun tidak menutup kemungkinan partai di daerah yang memberikan masukan terhadap pusat, hal tersebut terjadi pada koalisi KIH di Karangasem dan KRT di Tabanan. Kenyataan tersebut diperkuat dari bongkar-pasang kandidat yang terjadi karena perbedaan antara keputusan pusat dan daerah, dalam

KESIMPULAN

Pada kenyataannya koalisi yang dibangun dalam Pilkada di Kedua Kabupaten lebih berorientasi pragmatis, dimana di kedua Kabupaten terdapat koalisi dengan bergabungnya partai politik yang berseberangan secara ideology, yaitu dengan bergabungnya partai nasionalis-sekular dan partai agamais serta berkoalisinya partai yang berseberang antara PDIP dan Partai Golkar. Hal tersebut menunjukkan lunturnya ideology partai yang semestinya merupakan identitas yang membedakan satu partai dengan partai lainnya.

Terdapat perbedaan perilaku partai dengan kekuatan besar dan partai dengan kekuatan kecil terlihat dalam kedua daerah, berdasarkan hasil penelitian memaparkan bahwa partai dengan kekuatan kecil di daerah diberikan kebebasan yang lebih besar dalam menentukan kebijakan dalam mengusung calon maupun membentuk koalisi, sedangkan partai dengan kekuatan besar lebih mendominasi segala bentuk kebijakannya harus dilaksanakan oleh daerah dengan kata lain hanya memberikan kebebasan yang relative terhadap partai di daerah.

Peran partai politik dan kalkulasi elit merupakan 2 (dua) faktor yang sangat berpengaruh di dalam Pilkada di kedua kabupaten, karena kedua faktor ini selalu ada dan menjadi penentu keputusan atas koalisi maupun calon-

calon yang terbentuk dan dicalonkan oleh partai politik. Peran partai politik dan kalkulasi elit mempunyai pengaruh yang sama besar, dimana partai berperan sebagai lembaga yang mempunyai wewenang dan secara otoritas memiliki hak atas struktur dan organisasinya serta elit berperan sebagai individu-individu tau kelompok-kelompok yang mempunyai otoritas/kekuasaan dan pengaruh kuat dalam menentukan kebijakan.

DAFTAR PUSTAKA

Sumber Buku

Heywood, Andrew. (2014). *Politik*. Yogyakarta:Pustaka Pelajar.

Firmanzah. (2007). *Marketing Politik*.Jakarta:Yayasan Obor Indonesia.

Yuda, Hanta. (2010). *Presidensialisme Setengah hati*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.

Riwu Kaho, Josef. (2012). *Analisa hubungan pusat dan daerah di Indonesia*.

Yogyakarta:PolGov.

Riwu Kaho, Josef. (2006). *Politik Desentralisasi dan pemerintahan daerah*.

Yogyakarta:Universitas Gadjah Mada.

Setyadi, Elly.M. (2013).*Pengantar sosiologi politik*. Jakarta:Kencana.

Efriza.(2012). *Political Explore Sebuah kajian ilmu politik*. Bandung:Alfabeta.

Varma, SP. (2010). *Teori Politik Modern*. Jakarta : Raja Grafindo Persada.

Sumber Tesis dan Desertasi

Apriani, Kadek Dwita. 2010."Pengaruh Faktor Identifikasi Partai Politik dan faktor kandidat dalam Pemilukada Kabupaten Tabanan, Bali tahun 2010". Universitas Indonesia

Sumber Internet

KMP cenderung transaksional (Link diakses dari <http://nasional.sindonews.com/read/922474/12/cenderung-transaksional-sikap-kritis-KMP-bisa-kendur-141563211> , pada tanggal 14 Maret 2015)

Pilkada serentak, Bawaslu temukan 6 jenis pelanggaran (Link diakses dari <http://www.tempo.co>, pada tanggal 5 Agustus 2015)

Dikawin paksa, ABG-Sarjana kompromi (Link diakses dari www.nusabali.com/, pada tanggal 5 Agustus 2015)

Kader PDIP Berebut Rekomendasi (Link diakses dari <http://posbali.com/kader-pdip-berkompetisi-berebut> -

[rekomendasi/](#), pada tanggal 5 September 2015)

Daftar riwayat hidup I Wayan Sudirta, Dokumen KPUD Karangasem (Link

diunduh dari

<http://Infopilkada.kpu.go.id>, pada 21 Oktober 2015)

Daftar riwayat hidup I Made Sumiati, Dokumen KPUD Karangasem (Link

diunduh dari

<http://Infopilkada.kpu.go.id>, pada 21 Oktober 2015)

Daftar riwayat hidup I Gusti Ayu Mas Sumatri”, Dokumen KPUD Karangasem

(Link diunduh dari

<http://Infopilkada.kpu.go.id>, pada 21 Oktober 2015.

Daftar riwayat hidup I Wayan Artha Dipa, Dokumen KPUD Karangasem (Link

diunduh dari

<http://Infopilkada.kpu.go.id>, pada 21 Oktober 2015)

Daftar riwayat hidup I Made Sukarena”, Dokumen KPUD Karangasem (Link

diunduh dari

<http://Infopilkada.kpu.go.id>, pada 21 Oktober 2015)

Daftar riwayat hidup I Komang Kisid, Dokumen KPUD Karangasem (Link

diunduh dari

<http://Infopilkada.kpu.go.id>, pada 21 Oktober 2015)

Daftar riwayat hidup Ni Putu Eka Wiryastuti, Dokumen KPUD Tabanan (Link

diunduh dari

<http://Infopilkada.kpu.go.id>, pada 21 Oktober 2015)

Daftar riwayat hidup I Komang Gede Sanjaya, Dokumen KPUD Tabanan (Link

diunduh dari

<http://Infopilkada.kpu.go.id>, pada 21 Oktober 2015)

Daftar riwayat hidup I Wayan Sarjana, Dokumen KPUD Tabanan (Link diunduh

dari [http://Infopilkada.kpu.go.](http://Infopilkada.kpu.go.id)

[id](http://Infopilkada.kpu.go.id), pada 21 Oktober 2015)

Daftar riwayat hidup Ida Bagus Komang Astawa Merta, Dokumen KPUD

Tabanan (Link diunduh dari <http://Infopilkada.kpu.go.id>, pada 21 Oktober 2015)

Demokrat Tinggalkan Koalisi

Demokrat dan Gerindra (Link diakses dari

[http://m.inilah.com/news/detail/2235600/demokrat-tinggalkan-koalisi-](http://m.inilah.com/news/detail/2235600/demokrat-tinggalkan-koalisi-golkar-dan-gerindra/)

[golkar-dan-gerindra/](http://m.inilah.com/news/detail/2235600/demokrat-tinggalkan-koalisi-golkar-dan-gerindra/), pada 15

September 2015)

Sarjana Dituding Bayaran Rp. 4,5 M (Link diakses dari

[http://nusabali.com/opensdoc](http://nusabali.com/opensdoc.php?id=33463&page=&date=)

[.php?id=33463&page=&date=](http://nusabali.com/opensdoc.php?id=33463&page=&date=), diakses pada

13 September 2015)

